



Buletin

Isen Mulang

Buletin Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

edisi 299
September 2019



Pelindung :

Gubernur Kalimantan Tengah

Penasehat :

Sekretaris Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Pengarah :

Asisten Administrasi Umum
Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Sekda Prov. Kalteng

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Protokol dan Komunikasi
Publik Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Pemimpin Redaksi:

Kepala Bagian Penyaringan Informasi
dan Publikasi pada Biro Protokol
dan Penyaringan Informasi dan
Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Sekretaris Redaksi:

Kepala Sub Bagian Informasi
Pemerintahan dan Umum pada Biro
Protokol dan Penyaringan Informasi
dan Publikasi Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Wakil Sekretaris Redaksi:

Kepala Sub Bagian Media dan
Dokumentasi pada Biro Protokol
dan Penyaringan Informasi dan
Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Koordinator Distribusi :

Kepala Sub Bagian Informasi
Ekonomi, Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Biro Protokol
dan Penyaringan Informasi dan
Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Staf Pelaksana :

Mulyani, S.Sos, Eka Supriyaningsih,
Joko Prabowo, Nova Anggreni, Benito
Zuares

Alamat Redaksi :

Jl. RTA Milono No. 1 Palangka Raya
Telp/Fax (0536) 4200241

Ijin Penerbitan Khusus

No. 2114/SK/Dirjen PPG/STT/1995

Daftar Isi :

Presiden Joko Widodo Serahkan SK dan Peta TORA Wilayah Kalimantan	3
Sekda Kalteng : Isu Kependudukan Bersifat Multidimensional	4
Gubernur : Penanggulangan Karhutla Harus Sigap dan Cepat.	5
Gubernur dan Wagub beserta Masyarakat Kalteng Gelar Sholat Istisqa	6
Gubernur Sugianto Sabran : Keberadaan Kelembagaan JIGN Perlu Diperkuat	7
Gubernur Tegaskan Permasalahan Lahan Segera Diselesaikan	8
Kanwil ATR/BPN Kalteng Luncurkan HT-el	9
Orientasi Bagi Anggota dan Pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Periode 2019-2024	10
Pemprov Kalteng Terima Penghargaan Maturitas SPIP Level 3	11
Sertijab Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalteng Yang Baru	12
Sekda Kalteng Tutup Kalteng Trade Expo 2019	13
Kalteng Agustus 2019 Deflasi - 0,29 %	13
Sekda Kalteng : Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Harus Profesional	14
Gubernur : GAPKI Harus Dukung Pembangunan Daerah	15
Tanam Padi Perdana di Lahan Gambut Kota Palangka Raya	16
Target Rehabilitasi 2019 Di Kawasan BPDA SHL Kahayan Hanya 400 Hektar	17
Gubernur Kukuhkan Pengurus Komunitas Tionghoa Kalteng Periode 2019-2023	18
Perkawinan Usia Anak Di Kalteng Masih Tinggi	19



biropkp.kalteng.go.id



protokol komunikasi publik kalteng



sekretariat.daerah.kalteng



@biropkp_kalteng



buletin.isenmulang@gmail.com

Presiden Joko Widodo Serahkan SK dan Peta TORA Wilayah Kalimantan



Palangka Raya. Biro PKP. Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Redistribusi Tanah dan Peta Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada 4 provinsi di wilayah Kalimantan yang dihadiri Gubernur/Wakil Gubernur dan sejumlah Bupati/Walikota wilayah Kalimantan di Taman Digulis Pontianak Kalimantan Barat, Kamis (5/10/2019).

Wakil Gubernur Habib Ismail Bin Yahya yang mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menghadiri acara penyerahan SK dan Peta TORA oleh Presiden Joko Widodo

tersebut menyatakan sangat mengapresiasi program yang diluncurkan pemerintah pusat di bidang pertanahan.

Penyerahan SK dan Peta TORA itu sangat bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan umumnya dan masyarakat Kalimantan Tengah khususnya, sekaligus membuktikan bahwa Pemerintah Pusat hadir dan memperhatikan masyarakat di wilayah Kalimantan.

Habib Ismail juga sangat mendukung penegasan Presiden Jokowi bahwa Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) harus benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Lahan yang telah

diberikan itu jangan sampai diterlantarkan dan harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk Provinsi Kalimantan Tengah ada beberapa Kabupaten yang menerima SK dan Peta TORA tersebut meliputi Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan, Gunung Mas dan Kabupaten Kapuas. Provinsi Kalimantan Barat terdiri Kabupaten Sekadau, Bengkayang, Ketapang, Kapuas Hulu, Kubu Raya, Landak, dan Sanggau. Provinsi Kalimantan Selatan terdiri Kabupaten Barito Kuala, Balangan, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedangkan Provinsi Kalimantan Timur hanya Kabupaten Kutai Kartanegara yang menerima SK dan Peta TORA tersebut.

SK Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Redistribusi Tanah tahap pertama diberikan seluas 80 ribu hektar (Ha) untuk kawasan Kalimantan. Untuk Kalimantan Tengah tercatat 50 orang warga masyarakat yang menerima SK Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Redistribusi Tanah tersebut. Kemudian tiga provinsi lainnya masing-masing Kalimantan Barat 400 orang, Kalimantan Selatan 70 orang dan Kalimantan Timur 30 orang. SK Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Redistribusi Tanah itu diserahkan Presiden Joko Widodo kepada perwakilan masyarakat secara simbolis.

Pemerintah menargetkan pelepasan Kawasan Hutan Untuk Redistribusi Tanah seluas 4,1 juta hektar. Dari target tersebut tercatat 2,6 juta hektar tanah sedang dalam proses termasuk 980 hektar di antaranya telah memiliki SK.***

Sekda Kalteng : Isu Kependudukan Bersifat Multidimensional

Palangka Raya – Biro PKP. Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Kalimantan Tengah terus memantapkan sinergitas, dukungan pemerintah dan mitra kerja serta komitmen operasional pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam rangka percepatan kinerja Program KKBPK dalam RPJMN 2020-2024.

Plt Kepala BKKBN Perwakilan Kalteng Satyawati Kusumawijaya di hadapan peserta Rapat Telaahan Tengah Tahun Program KKBPK 2019 di Palangka Raya, Senin (23/09/2019) mengharapkan mekanisme operasional pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kalimantan Tengah dapat tersusun dengan baik dan Rapat Telaahan Tengah Tahun tersebut sebagai momentum pemerintah mewujudkan kualitas manusia menuju Kalteng Berkah. “Review tersebut dalam rangka mengevaluasi Program Telaahan Tengah Tahun terhadap keberhasilan maupun permasalahan yang ada serta menyusun kebijakan, strategi, program dan kegiatan semester II untuk mendapatkan masukan kesepakatan bersama sebagai pedoman pelaksanaan program selama satu tahun”, katanya.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng dalam sambutan tertulis dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Endang Kusriyatun mengatakan isu kependudukan merupakan isu yang multidimensional. “Isu Kependudukan merupakan isu yang multi

dimensional, demikian juga isu-isu turunannya seperti Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang juga tidak kalah kompleksnya. Ketiga hal tersebut telah ditugaskan amanatkan kepada BKKBN, yang artinya BKKBN memiliki tanggung jawab sekaligus tantangan yang luar biasa besar”, tegas Sekda.

Tanggung jawab besar tersebut merupakan penjabaran dari Cita Ke 5 dari NAWA CITA yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia” di mana Program KB menjadi salah satu cara untuk mewujudkan cita tersebut.

Ditegaskan, tahun 2019 merupakan akhir periode RPJMN sekaligus akhir periode RENSTRA BKKBN tahun 2015-2019 yang memerlukan perhatian khusus dalam mencapai sasaran 2019. Selain itu juga diperlukan komitmen seluruh jajaran Perwakilan BKKBN Provinsi Kalteng dan SOPD yang membidangi Keluarga Berencana di Kabupaten/Kota khususnya dalam menyusun dan melaksanakan langkah-langkah strategis untuk menuntaskan tercapainya target dan sasaran RPJMN dan RENSTRA BKKBN 2015-2019 sehingga BKKBN siap menghadapi target dan sasaran baru pada periode RPJMN dan RENSTRA BKKBN 2020-2024.

Program KKBPK memegang peran yang sangat sentral dalam upaya pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kebijakan KKBPK menjadi prasyarat untuk meningkatkan kinerja sektor-sektor lainnya. “Keberhasilan Program KKBPK akan memberikan yang landasan kuat bagi pencapaian keberhasilan pembangunan sektor lainnya. Demikian juga sebaliknya,

kegagalan Program KKBPK akan merusak potensi keberhasilan sektor lain, bahkan akan berakibat pada lamban atau stagnannya capaian pembangunan secara keseluruhan di tingkat Kabupaten/ Kota, Provinsi maupun secara Nasional”, ungkap Fahrizal.

Untuk itu diperlukan penajaman dalam penyusunan Grand Design Pengendalian Kependudukan (GDPK) yang menyangkut 5 aspek yaitu Peningkatan Kualitas Penduduk, Pengelolaan Kuantitas Penduduk, Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Pengembangan Sistem Informasi data Kependudukan yang berkualitas dan terintegrasi.

“Saya berharap kiranya Bapak Ibu Bupati dan Walikota bersinergi dengan DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat duduk bersama menyusun Grand Design Pengendalian Kependudukan di Provinsi Kalteng beserta seluruh Kabupaten/Kotanya” ujarnya.

Para Bupati dan Walikota se-Kalimantan Tengah diminta mendukung setiap program KKBPK mengingat program ini memiliki aspek strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing. “Tonggak keberhasilan Program KKBPK berada di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Demikian juga keberhasilan program KKBPK di Provinsi Kalteng sangat bergantung kepada kinerja teknis petugas, staf dan ASN di lingkup pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah”, beber Sekda Kalteng tersebut.***

Gubernur : Penanggulangan Karhutla Harus Sigap dan Cepat.

PALANGKARAYA – Biro PKP. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran memerintahkan jajaran yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan agar bertindak sigap dan cepat termasuk dukungan perusahaan swasta sangat diharapkan dalam menghadapi masalah karhutla di wilayah Kalimantan Tengah.

Gubernur Sugianto Sabran pada Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Satgas Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 bersama Tim Monitoring dan Evaluasi BNPB di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah Palangka Raya, Jumat (6/9/2019) mengemukakan salah satu permasalahan yang terjadi sebagai dampak karhutla adalah terganggunya jarak pandang dalam lalulintas penerbangan udara sehingga pendaratan pesawat harus dialihkan ke Bandara lain karena tidak bisa mendarat di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya akibat kabut asap.

Sementara itu, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) juga mengalami gangguan akibat kabut asap karhutla. Saat ini jangkauan lokasi yang terbakar di seputaran wilayah Palangka Raya sudah semakin melebar

jauh sehingga menyulitkan tim melakukan pemadaman titik api melalui jalur darat. Solusi satunya yang diharapkan saat ini adalah pemadaman melalui jalur udara.

Upaya pemadaman melalui udara hanya didukung 6 unit helikopter waterbombing masing-masing ditempatkan di Bandara Iskandar Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat 1 unit dan 2 unit di Bandara Haji Asan Sampit Kotawaringin Timur sedangkan 3 unit beroperasi di Bandara Udara Tjilik Riwut Palangka Raya.

Sugianto Sabran berharap mendapat dukungan penambahan armada helikopter waterbombing apabila titik hot spot karhutla semakin banyak. "Selain itu kita juga akan mengusulkan apabila memungkinkan diadakannya rekayasa cuaca, perlu dibuat hujan buatan. Kita juga akan mengambil langkah-langkah berkenaan dengan pengaturan jam sekolah, khususnya di Palangka Raya. Jangan sampai ada perbedaan pengaturan kebijakan", tegas gubernur.

Tim Monitoring dan Evaluasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI yang dipimpin Mayjen TNI (Purn) Amrin mengatakan tugas Satgas Karhutla adalah melaksanakan

pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, namun tidak menutup kemungkinan juga ikut melakukan pemadaman. "Untuk itu maksimalkan antisipasi dengan pencegahan dini Karhutla dan selalu aktif mensosialisasikan dampak karhutla kepada masyarakat sehingga diharapkan masyarakat dapat memahami serta turut berperan aktif dalam pencegahan karhutla", ujarnya.

Kalimantan Tengah dengan lahan gambutnya memang rawan terjadi karhutla dan apabila terjadi kebakaran susah untuk dipadamkan. "Oleh sebab itu diimbau kepada masyarakat supaya tidak melakukan pembakaran dan adanya sanksi kepada siapapun yang dengan sengaja membakar hutan dan lahan", tegas Amrin.

Pemerintah Kabupaten dan Kota juga diminta terus meningkatkan perhatian dan kontribusinya terhadap pelaksanaan program pencegahan karhutla di wilayahnya masing-masing baik dari aspek kebijakan, SDM, materiil maupun aspek finansial. "Program pencegahan karhutla adalah bantuan pemerintah pusat melalui BNPB kepada daerah untuk mengoptimalkan pencegahan Karhutla. Namun tanggung jawab dan pelaksanaannya tetap berada pada pimpinan daerah masing-masing", sebut Amrin.***



Gubernur dan Wagub beserta Masyarakat Kalteng Gelar Sholat Istisqa

Palangka Raya – Biro PKP. Musim kemarau panjang yang melanda sebagian wilayah Indonesia termasuk Kalimantan Tengah telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat serta kerusakan lingkungan alam yang nampaknya sulit dihindari.

Berbagai upaya pemerintah terus dilakukan untuk mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan khususnya di wilayah Kalimantan Tengah dengan melibatkan segenap potensi dan kekuatan pemerintah pusat dan daerah termasuk penggerahan unsur TNI/Polri dan masyarakat, yang disertai dengan kegiatan spiritual dalam bentuk doa bersama lintas agama dan Sholat Istisqa meminta hujan.

Sholat Istisqa meminta hujan turun diselenggarakan serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah mulai tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota hingga ke tingkat Kecamatan pada hari Rabu pagi, (18/09/2019).

Sholat Istisqa di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah digelar di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah yang diikuti Gubernur H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Habib Ismail Bin Yahya, Pimpinan TNI/Polri dan warga masyarakat Palangka Raya dengan Khatib H.Khairil Anwar, K.H Anwar Isa sebagai Imam dan Doa disampaikan Guru Muksin.

“Selaku umat beragama, kita harus berikhtiar dan memohon doa kepada Allah supaya diturunkan hujan sehingga kita bisa terbebas dari kecana karhutla ini”, jelas Sugianto Sabran kepada awak media seusai mengikuti Sholat Istisqa tersebut.

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran juga menjelaskan sudah menetapkan status tanggap darurat karhutla untuk provinsi Kalteng yang berlaku hingga



akhir Oktober dan diharapkan akhir Oktober turun hujan. “Untuk itu pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota yang telah menetapkan status tanggap darurat karhutla agar menyiapkan dana pengobatan gratis, rumah singgah dan rumah oksigen untuk balita di beberapa titik yang tersebar di wilayah Kalimantan Tengah”, tegas gubernur.

Demikian juga bagi korban yang terpapar asap akan ditangani secara maksimal sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah. “Pemerintah juga terus mengingatkan masyarakat agar tidak membakar lahan pada musim kemarau kering yang terjadi antara bulan Juli hingga September tiap tahun. Demikian juga kepada para sopir kendaraan roda 4 dan roda 2 serta warga masyarakat diimbau agar tidak boleh membuang puntung rokok secara sembarangan saat berkendara sehingga dapat menimbulkan karhutla”, beber Sugianto.

TNI/POLRI dan masyarakat sudah turun ke lapangan dan telah berusaha maksimal, namun kurang didukung peralatan yang memadai. “Setelah melakukan peninjauan lapangan sekaligus melakukan evaluasi di beberapa daerah, ternyata masih banyak peralatan kita yang kurang sehingga ke depannya perlu dilakukan pemetaan terhadap kebutuhan peralatan”, ungkap

Sugianto.

Menghadapi peristiwa karhutla ini tidak perlu saling menyalahkan. “Kita sama-sama salah. Untuk itu kita bahu membahu bagaimana caranya memadamkan api untuk mengatasi karhutla ini, tanpa harus saling menyalahkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saya selaku Gubernur meminta Bapak Presiden agar memberikan tanggungjawab penuh kepada pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota secara berjenjang termasuk dalam pengelolaan anggaran sehingga daerah bisa lebih optimal lagi dalam mencegah dan menanggulangi karhutla”, ujarnya.

Upaya pengendalian dan pemadaman karhutla di Kalimantan Tengah terus diintensifkan termasuk membuat hujan buatan melalui rekayasa cuaca dengan penaburan garam 1,5 ton di wilayah udara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Koordinator Lapangan Water Bombing Satgas Karhutla Kalteng Kapten Irvan menjelaskan hujan buatan telah dilakukan di wilayah udara Kalteng dan Kalsel. Pesawat CN AU juga sudah berada di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya dengan membawa 3 ton garam yang sudah dicampur bahan kimia untuk ditaburkan di wilayah udara Kalimantan Tengah dalam upaya membuat hujan buatan.***

Gubernur Sugianto Sabran : Keberadaan Kelembagaan JIGN Perlu Diperkuat.

PALANGKA RAYA – BIRO

PKP. Kebijakan Satu Peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal sangat diperlukan untuk mendorong penggunaan informasi geospasial guna pelaksanaan pembangunan nasional dan mendukung terwujudnya agenda prioritas pembangunan nasional.

Penyelenggaraan satu data yang akuntabel dan berintegritas berdasarkan sistem informasi geospasial Indonesia adalah salah satu prinsip umum yang akan dikembangkan oleh pemerintah menuju era integrasi satu data dan keterbukaan pemerintah (open government). "Karena itu, tata kelola data yang baik tidak lepas dari komitmen pemberian kelembagaan sebagai pintu utama pelaksana dan penanggungjawab berbagi pakai data untuk kebutuhan pembangunan" beber gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis disampaikan Sekda Kalteng Fahrizal Fitri di depan peserta Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Jaringan Informasi Geospasial Nasional Regional Kalimantan di Palangka Raya, Selasa pagi (3/9/2019).

Sugianto Sabran menegaskan sejalan dengan tatakelola tersebut maka keberadaan kelembagaan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) perlu dipertahankan dan diperkuat karena memiliki peran strategis sebagai pembina data spasial yakni penanggungjawab basis dan analisis spasial yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

di daerah.

Peran Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) bertambah penting dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden pada peluncuran geoportal Kebijakan Satu Peta tanggal 11 Desember 2018 di Hotel Bidakara Jakarta yang menekankan agar Pemerintah Daerah perlu bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga dalam menyelesaikan isu-isu yang tumpang tindih. "Karena itu diperlukan pembinaan untuk penguatan kapasitas kelembagaan dalam mengoperasionalisasikan fungsi Simpul Jaringan dan Infrastruktur Informasi Geospasial sehingga mampu mengembangkan tugasnya dengan baik mulai perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data hingga penyelesaian konflik keruangan" tegas gubernur Sugianto.

Dukungan pemerintah daerah untuk meningkatkan operasionalisasi fungsi Perangkat Daerah simpul jaringan sangat penting sehingga mampu mengintegrasikan dan mensinkronisasikan informasi geospasial tematik serta menyelesaikan berbagai permasalahan dan konflik ruang seperti tumpang tindih perijinan dan kebencanaan.

Sineritas antar para

pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah, akademisi, sektor swasta dan mitra pemerintah lainnya sangatlah penting, dengan harapan seluruh target rencana aksi Kebijakan Satu Peta (KSP) bisa tercapai dalam rangka mewujudkan terintegrasi berbagi pakai data. "Dengan memperhatikan hal tersebut, saya harapkan komunikasi, koordinasi dan konsolidasi antar simpul jaringan di tingkat pusat dan daerah dapat terus kita tingkatkan", jelas Sugianto Sabran.

Sementara itu Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Dr. Khafid mengatakan penyelenggaraan Bimtek Penguatan Jaringan Informasi Geospasial Nasional Regional Kalimantan ini dilatarbelakangi beberapa hal antara lain sulitnya akses data dan memperoleh data juga tidak bisa cepat serta datanya tidak standar. "Untuk itu penting bagi kita duduk bersama, berbagi pakai data dan kemudahan aksesnya," tutur Khafid.

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya penguatan simpul jaringan daerah yang diharapkan lebih berkualitas dan bermanfaat agar mampu memberikan kontribusi aktif dalam pencapaian pembangunan daerah.***



Gubernur Tegaskan Permasalahan Lahan Segera Diselesaikan.



PALANGKA RAYA – Biro PKP. Pemanfaatan barang milik pemerintah daerah khususnya tanah dapat memberikan potensi yang luar biasa bagi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, meskipun pemanfaatan aset di provinsi Kalimantan Tengah belum dilaksanakan secara optimal. Namun dengan adanya kejelasan akan status tanah maka sengketa dan konflik pertanahan bisa dihindari sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah.

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengungkapkan hal tersebut pada Acara Penandatanganan Nota Kesepakatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kanwil BPN Provinsi Kalteng dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dalam rangka penataan dan pengelolaan aset tanah milik pemerintah daerah di Palangka Raya, Kamis (12/09).

Ditegaskan, permasalahan mengenai lahan terutama yang berkaitan dengan masyarakat setempat harus segera diselesaikan. "Kita sering mendengar atau mengalami gugatan hingga pendudukan fisik tanah atau barang milik daerah. Untuk menyelesaikan sengketanya sangat rumit karena masing-masing pihak memiliki

bukti hukum sendiri dan dengan kekuatan hukum yang sama", beber Sugianto Sabran.

Saat ini pemerintah provinsi Kalteng terus berupaya melakukan tertib administrasi terhadap barang milik daerah yang dimiliki untuk mendapatkan legalitas hukum yang sah antara lain

melalui inventarisasi dokumen bukti kepemilikan tanah milik pemerintah provinsi Kalimantan Tengah.

Sebagai bukti hukum yang sah, salah satunya dengan melakukan inventarisasi dokumen bukti kepemilikan tanah milik Pemprov Kalteng. "Kita ingin semua aset milik daerah yang berada di seluruh Kabupaten dan Kota diinventarisir serta permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan. Contohnya, tumpang tindih antara pemerintah dengan masyarakat mengenai lahan", sebut Sugianto.

Gubernur meminta seluruh Bupati dan Walikota se-Kalteng agar mengimplementasikan Nota Kesepakatan Tentang Kerja Sama di didang pertanahan dengan menerapkan kebijakan di masing-masing daerah yang bisa mendukung pendapatan dan penertiban barang milik daerah terutama tanah.

Sekda Kalteng Fahrizal Fitri menjelaskan Penandatanganan MoU dan PKS antara Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalteng dengan BPN se-Kalimantan Tengah ini antara lain dalam rangka penataan dan pengelolaan aset daerah yang lebih tertib, akuntabel dan transparan serta pengelolaan

aset daerah yang profesional dan modern dengan mengedepankan prinsip good governance.

Penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerjasama tersebut juga bertujuan agar pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berbenah dan memperbaiki pengelolaan barang milik daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan barang dan keuangan yang baik. "Untuk itu diperlukan peran serta para pemangku kepentingan khususnya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalteng dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah pertanahan, pelaksanaan legalisasi kepemilikan barang milik daerah, pengembangan data pertanahan, serta pendaftaran tanah dan percepatan persertifikatan tanah milik Pemprov Kalteng", terang Fahrizal Fitri.

Dijelaskan, sampai saat ini Rekapitulasi Tanah Milik Pemprov Kalteng berdasarkan inventarisasi dan penyerahan pelimpahan aset yang berasal dari personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P2D) Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalteng sebanyak 926 persil bersertifikat, sedangkan 179 persil belum bersertifikat. Pemprov Kalteng akan segera melakukan proses pensertifikatannya sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani tersebut.

Penandatanganan Nota Kesepakatan itu disaksikan Kepala Divisi Pencegahan dan Penindakan KPK RI Koordinator Wilayah 7 Nana Mulyana, Koordinator Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Herda Helmijaya, Direktur Pemanfaatan Tanah Pemerintah Badan Pertanahan Nasional Iskandar Syah, serta Bupati/Walikota dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten/Kota se-Kalteng.***

Kanwil ATR/BPN Kalteng Luncurkan HT-el.

PALANGKA RAYA – Biro PKP. Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan beberapa layanan pertanahan yang dapat diakses oleh masyarakat secara elektronik meliputi layanan Hak Tanggungan, Zona Nilai Tanah, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Layanan Informasi Bidang Tanah. Kementerian ATR/BPN juga terus mendorong pemerintah daerah agar segera menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan para investor dalam berusaha serta terus mengembangkan Layanan Online Bidang Tata Ruang dengan nama Geographic Information System Tata Ruang atau GIS TARU

Sementara itu pada Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Selasa (24/09/2019) diluncurkan layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) dan Penyerahan Sertifikat Hak Pakai, Wakaf dan Hak Milik

kepada masyarakat.

Jumlah Sertifikat Hak Pakai yang diserahkan sebanyak 74 sertifikat dengan perincian 22 sertifikat untuk Kabupaten Barito Timur, 30 sertifikat untuk Kabupaten Gunung Mas, 15 sertifikat untuk Kabupaten Kotawaringin Timur, 5 sertifikat untuk Kabupaten Kotawaringin Barat sedangkan Kabupaten Katingan, Barito Utara dan Kabupaten Pulang Pisau masing-masing 1 sertifikat Hak Pakai.

Selain Sertifikat Hak Pakai juga diserahkan 4 Sertifikat Wakaf masing-masing 2 sertifikat untuk Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Utara dan Kapuas masing-masing 1 sertifikat serta 3 Sertifikat Hak Milik masing-masing 1 sertifikat untuk 3 Pemegang Hak di Kabupaten Kapuas.

Peringatan HANTARU Tingkat Provinsi Kalteng 2019 yang mengambil tema “ATR/BPN Menuju Penataan Ruang dan Pelayanan Pertanahan yang Berkepastian Hukum dan Modern” itu juga dihadiri Sekda Kalteng Fahrizal Fitri sekilas

meluncurkan Layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) Kanwil ATR/BPN Provinsi Kalimantan Tengah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Sofyan Djalil dalam sambutannya dibacakan Kepala Kanwil ATR/BPN Kalteng Pelopor mengatakan pemilihan tema HANTARU 2019 tersebut diharapkan dapat menjadi pengingat dan penyemangat dalam meningkatkan kualitas pelayanan. “Dapat menjadi pengingat dan menyemangat kita semua dalam peningkatan kualitas pelayanan pertanahan dan tata ruang secara modern serta menjamin kepastian hukum,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN Sofian Djalil.

Menteri Sofyan Djalil juga mengapresiasi kinerja jajaran Kementerian ATR/BPN tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang dapat mencapai target Program Strategis Nasional terutama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Reforma Agraria, Percepatan Tata Ruang, Pengadaan Tanah, Pengendalian Ruang dan Penanganan Sengketa Pertanahan yang mengalami kemajuan cukup menggembirakan.

Kementerian ATR/BPB saat ini juga tengah menyusun Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang diharapkan dapat menyempurnakan aturan pertanahan yang sudah ada sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Menteri ATR/BPN optimistis Visi Kementerian ATR/BPN 2025 untuk menjadi institusi pelayanan berstandar dunia akan terwujud dengan target seluruh bidang tanah terdaftar serta digitalisasi seluruh arsip dan warkah selesai.***



Orientasi Bagi Anggota dan Pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Periode 2019-2024.

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Anggota dan Pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Tengah Periode 2019-2024 mengikuti Orientasi yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah di Hotel Bahalap Palangka Raya, Senin (23/09/2019).

Orientasi tersebut dalam rangka meningkatkan sinergitas dan harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota dengan Lembaga DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Orientasi yang diikuti 245 Anggota DPRD dari 9 Kabupaten dan Kota termasuk Anggota dan Pimpinan DPRD Provinsi Kalteng itu bertujuan antara lain mengenalkan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, memantapkan pemahaman tentang idiosiologi negara, konstitusi dan wawasan kebangsaan serta meningkatkan semangat pengabdian kepada bangsa dan NKRI.

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menegaskan Kepala Daerah dan DPRD sejatinya adalah “Nakhoda” bahtera birokrasi pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan bingkai koridor Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang disusun dan disahkan peraturan daerah bersama DPRD. “Maka keharmonisan dan kemitraan keduanya merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah”, tegas Sugianto Sabran.

Kedudukan DPRD sesuai Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD. Jadi kedudukan DPRD dan Kepala Daerah beserta jajarannya adalah sejajar, bersama-sama sebagai mitra. “Untuk itu, hubungan

keduanya sebagai mitra harus dijaga. Harus selalu sinergi dan selalu menjaga harmonisasi, agar masyarakat yang diwakili bisa tenang, damai. Jangan sampai antara DPRD dan Kepala Daerah beda pendapat dan saling menjatuhkan satu dengan lainnya sehingga berimbang tidak maksimalnya roda pemerintahan”, kata Sugianto.

Pemerintah Daerah dan DPRD harus saling menghargai dan boleh menyampaikan kritik, karena perbedaan pendapat hal yang biasa. Namun kritik harus disampaikan dengan baik sesuai dengan norma. “Untuk itu lah, penting bagi kita untuk membaca dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya dalam hal pembahasan anggaran atau APBD. Saya berharap, pembahasan jangan sampai berlarut-larut atau bahkan bermasalah. Karena kalau sampai berlarut-larut atau bahkan mengalami keterlambatan, masyarakat yang akan terkena dampaknya. Di dalam politik anggaran, tidak jamannya lagi proses penyusunannya tertutup, tidak partisipatif dan pragmatis. Proses penyusunan anggaran hendaknya mengikuti kaidah yang sudah ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku”, beber gubernur.

Berkenaan dengan fungsi legislasi, Gubernur

mengungkapkan “Saya berharap agar DPRD dapat memaksimalkan fungsinya dengan melahirkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna melindungi hak, kewajiban dan kepentingan masyarakat di wilayah tugas masing-masing. Jangan pernah ragu untuk bertanya kepada rakyat, baik melalui jaring inspirasi maupun saat reses. Disamping itu perlu juga mendengar pikiran-pikiran para ahli. Gunakan teknologi informasi yang semakin berkembang saat ini, bisa melalui sosial media, media elektronik dengan peralatan elektronik yang tersedia. Saya berharap agar anggota DPRD, hendaknya senantiasa amanah untuk mendengar dan memperhatikan aspirasi masyarakat dengan cara meminta keterbukaan anggota legislative dalam perannya melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, dan harus punya tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan tugas dengan mendahulukan kepentingan masyarakat luas, tidak untuk kepentingan kelompok politik”, pungkas Sugianto.

Orientasi bagi Anggota dan Pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota yang diselenggarakan mulai tanggal 22 s.d 26 September di Hotel Bahalap Palangka Raya itu dengan nara sumber Pejabat Struktural dan Widya Iswara dari Kemendagri, Pemprov Kalteng dan BPSDM Provinsi Kalteng.***



Pemprov Kalteng Terima Penghargaan Maturitas SPIP Level 3

PALANGKA RAYA – Biro PKP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima penghargaan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Level 3 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Piagam Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Setia Pria Husada kepada Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran di Palangka Raya, Senin sore (23/9/2019).

Gubernur Sugianto Sabran menyambut baik atas penghargaan SPIP Level 3 dari BPKP tersebut sebagai bukti kegiatan pengawasan keuangan di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sudah lebih baik. "Alhamdulillah pada sore hari ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendapat penghargaan level 3 SPIP—Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah yang mana tidak seluruh provinsi menerima. Salah satunya Provinsi Kalimantan Tengah alhamdulillah sudah masuk ke situ. Berarti dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan sudah masuk ke level 3, lebih bagus", kata Sugianto Sabran.

Gubernur berharap kualitas SDM dan kinerja pemerintahan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan lebih baik lagi ke depannya. "Kita ingin peningkatan kinerja pegawai Aparatur Sipil Pemerintah di Kalimantan Tengah lebih baik lagi ke depannya. Evaluasi-evaluasi sudah ada contoh-contohnya seperti masalah pelayanan ditingkatkan, auditor ditingkatkan. Kita menyekolahkan orang yang berpotensi di bidang keuangan, bagaimana harus mengerti akunting karena akunting penting bagi pemerintah," ujarnya.

Sementara itu Kepala

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Setia Pria Husada menjelaskan bahwa SPIP Level 3 merupakan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga tahun 2019. "Target RPJMN pemerintah tahun 2019 semua Pemda dan K/L harus sudah level 3 secara nasional semua. Ternyata Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 telah memenuhi Level 3, artinya kalau sudah level 3 sistemnya sudah semakin kuat pengendaliannya. Jadi, bukan berdasarkan orangnya, tapi by system bekerja itu", jelasnya.

BPKP akan terus mengawal agar sistem pengendalian tersebut tetap berjalan. "Kami akan terus mengawal sistem tadi. Meski sudah level 3 itu bukan berarti selesai. Kami tetap bina terus, kami juga agar tetap bekerja sistemnya. Mungkin kami akan berkolaborasi dengan BPK, mungkin di masalah pencatatan aset dan sebagainya," imbuh Setia.***



Sertijab Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalteng Yang Baru



Palangka Raya – Biro PKP. Jabatan Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah diserahterimakan dari Plt. Bambang Iriana Djajaatmadja kepada Kepala Kanwil yang baru Ilham Djaya di Palangka Raya, Kamis (5/9/2019).

Gubernur Kalimantan Tengah dalam sambutan tertulis disampaikan Sekda Kalteng Fahrizal Fitri menyampaikan terima kasih dan penghargaannya kepada Plt. Kepala Kanwilmenhum dan HAM Bambang Iriana Djajaatmadja yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik melalui karya, pembaharuan dan terobosan selama bertugas di Kalimantan Tengah.

Gubernur Sugianto Sabran juga mengharapkan kepada Kepala Kanwilmenhum dan HAM Kalteng yang baru Ilham Djaya agar mengintensifkan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan seluruh stake holder dan mendukung kegiatan yang diselenggarakan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah.

Berkaitan dengan upaya Kanwil Kementerian Hukum dan

HAM Kalteng membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 2019, menurut Sugianto Sabran perlu dievaluasi dan dukungan semua pihak menuju WBK/WBBM untuk mewujudkan good governance dan clean government.

Persoalan lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dan anak-anak di kota maupun di desa. "Hal tersebut sangat memprihatinkan kita semua dan perlu komitmen kita dengan jajaran penegak hukum untuk selalu bersinergi/

bekerjasama dalam memberantas dan menanggulanginya", tegas Sugianto Sabran.

Pembinaan warga binaan yang tersangkut narkoba perlu menjadi perhatian agar mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya dan itu perlu adanya kebersamaan dan koordinasi dengan berbagai pihak.

Demikian juga pengawasan terhadap orang asing terus diintensifkan. "Kami mengharapkan agar petugas imigrasi selalu meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan orang asing dengan TIM PORA yang sudah dibentuk, mengingat keberadaan orang asing/WNA melakukan berbagai kegiatan di wilayah Kalimantan Tengah", beber Sugianto.

Keberadaan orang asing/WNA harus memberikan kontribusi positif bagi pemerintah dan negara terutama dalam menjaga stabilitas nasional sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Keimigrasian."Dalam hal pembentukan Hukum Perda dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat serta pelayanan publik berbasis HAM membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, sehingga apa yang menjadi Visi dan Misi pemerintah provinsi Kalteng dan kementerian Hukum dan HAM bisa terwujud secara bersama-sama", kata gubernur.***



Sekda Kalteng Tutup Kalteng Trade Expo 2019.

Palangka Raya – Biro PKP. Agenda tahunan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah “Kalteng Trade Expo” 2019 yang berlangsung lima hari mulai tanggal 7 s.d 11 September 2019, berakhir dan ditutup secara resmi oleh Sekda Kalteng Fahrizal Fitri mewakili Gubernur Kalimantan Tengah di Arena Pamerang Temanggung Tilung Palangka Raya, Rabu (11/09/2019).

Kalteng Trade Expo yang diikuti sebagian besar pelaku usaha binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalteng di bidang industri dan perdagangan itu, diharapkan menjadi pelaku usaha yang tangguh dan siap menghadapi pasar global.

Para pelaku usaha mulai pedagang kaki lima hingga usaha swasta skala besar memperoleh

manfaat dan keuntungan secara finansial dalam event Kalteng Trade Expo 2019 ini. “Semuanya itu tidak lepas dari keseriusan dan komitmen pemerintah provinsi Kalteng dalam menciptakan peluang usaha kepada masyarakat”, sebut Gubernur Kalteng dalam sambutan tertulis disampaikan Sekda Kalteng Fahrizal Fitri pada penutupan Kalteng Trade Expo 2019 tersebut.

Namun gubernur menilai keberadaan para eksportir dalam konteks perdagangan global, masih belum berpartisipasi dalam ajang KTE 2019. “Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri di masa mendatang untuk melibatkan para eksportir Kalteng ambil bagian dalam ajang KTE ini”, imbuh gubernur.

Demikian juga partisipasi unsur-unsur yang mewakili Kabupaten/Kota se-Kalteng masih belum seluruhnya bisa mengambil

bagian dan bersinergi secara signifikan dengan pemprov Kalteng dalam mempromosikan produk-produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor. “Ke depan kita akan lebih dapat menciptakan terobosan-terobosan baru guna meningkatkan pengembangan perdagangan dan industri Kalimantan Tengah. Kata Sugianto.

Melalui KTE ini diharapkan produk-produk unggulan Kalteng yang berorientasi eksport harus dikemas sedemikian rupa sehingga masyarakat luas mengetahui produk unggulan yang layak dieksport dan mampu bersaing dengan produk dari daerah lain. “Saya berharap event ini berlanjut dan lebih ditingkatkan lagi serta mengupayakan para eksportir Kalteng bahkan jika memungkinkan mengundang pihak luar negeri, jadi pesertanya tidak hanya UKM”, jelas Sugianto Sabran.***

Kalteng Agustus 2019 Deflasi - 0,29 %

Palangka Raya – Biro PKP. Kalimantan Tengah pada Agustus 2019 mengalami deflasi -0,29 %, sedikit lebih dalam dibanding Juli -0,25 %. Komoditas penyumbang deflasi pada Agustus tersebut adalah kelompok administered price dan volatile foods.

Sebagian besar kota sampel inflasi di pulau Kalimantan pada Agustus 2019 mengalami deflasi, termasuk Kota Sampit dan Palangka Raya mengalami deflasi yang cukup dalam, sedangkan deflasi Kalteng pada Agustus 2019 tertinggi ke-3 di Kalimantan.

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kalteng dalam Rilisnya, Selasa (3/9) menyebutkan prospek ke depan diperkirakan kelompok administered prices, core dan volatile foods dapat

mempengaruhi tekanan inflasi.

Komoditas angkutan udara dan isu kenaikan iuran BPJS, tren kenaikan harga emas dunia akibat ketidakpastian ekonomi global serta musim kemarau yang diprediksi akan berlangsung hingga Oktober, ditengarai dapat memengaruhi tekanan

Inflasi ke depan.

Kepala Biro Ekonomi Setda Kalteng Drs.Lubis R. Inin menjelaskan program rutin TPID terus melakukan pemantauan hargapasar, menjaga ketersediaan stok dan kelancaran distribusi komoditas yang didatangkan dari luar daerah, peningkatan kualitas atas pemanfaatan kandang dan kolam penyangga termasuk pasar penyeimbang untuk menjaga

kestabilan harga.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait juga terus melakukan rencana aksiantara lain melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kalteng memantau ketersediaan dan kestabilan harga cabai rawit, sementara Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan tetap menjaga kestabilan pasokan bibit ayam ras yang akan dipanen bulan Oktober serta mempersiapkan kebutuhan menjelang Natal dan Tahun Baru.

Demikian juga Dinas Perikanan mengoptimalkan pengelolaan kolam penyangga, sedangkan Dinas ESDM menjaga dan memastikan pasokan elpiji hingga akhir tahun 2019 tetap aman serta akan memantau program penyaluran elpiji oleh BUMDes yang saat ini masih diproses oleh pihak Pertamina.***

Sekda Kalteng : Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Harus Profesional.

Palangka Raya – Biro PKP. Teknologi informasi berkembang sangat pesat sehingga mempengaruhi pasar dan pola bisnis pelaku usaha. Demikian pula kebijakan perdagangan dunia yang semakin terbuka menuntut pelaku usaha dalam negeri untuk meningkatkan daya saingnya. Situasi ini turut mempengaruhi perubahan lingkungan strategis pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kini, pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin didorong untuk memberikan value for money, tidak lagi mengejar barang dan jasa dengan harga termurah.

Sekda Kalteng Fahrizal Fitri mengemukakan hal tersebut dalam sambutannya disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Yuel Tanggara pada Rapat Koordinasi Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Senin (23/09/2019).

Menurut Sekda, kebutuhan akan sumber daya manusia sebagai pengelola pengadaan

dan unit kerja yang menangani pengadaan barang dan jasa pemerintah secara profesional semakin tidak terelakkan. "Pengelola pengadaan yang tepat diharuskan memiliki kompetensi khusus dalam bidang pengadaan melalui pembentukan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Mereka akan secara penuh waktu dalam sebuah Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPB) yang memiliki fungsi lengkap dan menyeluruh", terang Fahrizal Fitri.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah merumuskan aturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baru melalui Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diharapkan mempercepat dan mempermudah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak berbelit-belit, tapi sederhana sehingga memberikan value for money yang mudah dikontrol dan diawasi.

Langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

dalam pengadaan barang/jasa antara lain pengumuman secara terbuka rencana dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah/Institusi lainnya kepada masyarakat luas serta pengadaan barang/jasa dilakukan dengan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. "Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah juga harus meningkatkan penggunaan produksi barang/jasa dalam negeri yang sasarannya untuk memperluas kesempatan kerja dan basis industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi dan daya saing nasional. Pengadaan barang/jasa pemerintah juga harus meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, koperasi kecil dan kelompok masyarakat", beber Sekda.

Fahrizal Fitri meminta peserta Rakor tersebut agar mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai Perpres No. 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang salah satu aksinya adalah meningkatkan independensi, transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa.

Demikian juga kepada seluruh pimpinan OPD lingkup Pemprov Kalteng diminta segera melakukan persiapan dan pemenuhan Jabatan Fungsional Pengadaan di setiap OPD dan UKPB Pemerintah Provinsi sesuai hasil analisis beban kerja masing-masing. Setiap Jabatan Fungsional Pengadaan harus memenuhi syarat sudah memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang/jasa.***



Gubernur : GAPKI Harus Dukung Pembangunan Daerah.

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengharapkan peran Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan di Kalimantan Tengah lebih ditingkatkan lagi karena masyarakat memang memerlukan keberadaan GAPKI.

Sugianto Sabran mengatakan dukungan GAPKI kepada masyarakat dan pemerintah daerah bisa diwujudkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur jalan umum dari dan menuju areal perusahaan, ikut aktif dalam penyelesaian permasalahan/sengketa lahan ataupun konflik dengan pekerja dan aktivitas

usaha harus memperhatikan RTRWP Kalteng serta mentaati dan menyelesaikan perizinan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“GAPKI juga harus mengevaluasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pemenuhan hak dan kewajiban pekerja di lingkungan kerja serta meningkatkan program CSR di bidang perkebunan”, tegas Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis disampaikan Sekda Kalteng Fahrizal Fitri ketika membuka Workshop Regional dengan tema “Sawit Berkelanjutan : Dialog Sosial Untuk Pekerjaan Yang Layak”, di Aquarius Hotel Palangka Raya, Kamis (5/9/2019).

Usaha kelapa sawit berdampak luas terhadap kegiatan masyarakat, perekonomian, sosial dan lingkungan. Untuk itu memerlukan iklim investasi yang sehat dan dinamis guna terwujudnya Visi dan Misi GAPKI di Kalimantan Tengah. “Meskipun dalam perkembangannya, usaha di bidang kelapa sawit ini banyak menimbulkan pro dan kontra, namun pada kenyataannya tetap berjalan dan berkelanjutan sehingga ini menjadi perhatian kita bersama” ujar Gubernur.

Workshop tersebut mengangkat berbagai isu antara lain tentang persoalan pekerja di areal kerja dan peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menjadi partner pengusaha yang terkait dengan status ketenaga kerjaan, dialog sosial, keselamatan dan kesehatan kerja.

Isu lainnya yang mengemuka dalam Workshop tersebut tentang pekerja anak dan pekerja wanita, upah pekerja, pengawasan pemerintah dan tuntutan para pekerja terhadap Serikat Pekerja/Serikat Buruh atas hak dan kewajiban pekerja. “Hal lainnya yang perlu ditingkatkan adalah Program CSR di bidang perkebunan dan kewajiban membayar pajak oleh setiap PBS guna menunjang pengembangan pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan di Provinsi Kalteng”, terang Sugianto Sabran.

Workshop Regional tersebut dihadiri sejumlah pengurus GAPKI Pusat dan Daerah, Perwakilan Serikat Buruh dan Serikat Pekerja Provinsi Kalteng, Pengurus Asosiasi serta para pengusaha perkebunan kelapa sawit sebagai Anggota GAPKI dan BPJS Ketenagakerjaan.***



Tanam Padi Perdana di Lahan Gambut Kota Palangka Raya

PALANGKA RAYA –Biro PKP. Kota Palangka Raya untuk pertama kalinya melakukan penanaman padi di lahan gambut sebagai tindak lanjut kerjasama “Gerakan Percepatan Tanam Padi Di Lahan Gambut Kota Palangka Raya” antara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalimantan Tengah dengan Dinas TPHP Kota Palangka Raya di Kelurahan Tanjung Pinang Palangka Raya, di bawah pengawasan Kementerian Pertanian RI.

“Kalteng memiliki lahan gambut yang luas, mendekati angka 3 juta Ha. Hari ini kita menerapkan teknologi tata kelola air dengan membangun kanal, tanggul dan pompanisasi”, kata Sekda Kalteng Fahrizal Fitri ketika melakukan penanaman padi perdana di Kelurahan Tanjung Pinang Palangka Raya, Rabu (4/9/2019).

Tanam padi perdana di wilayah Kota Palangka Raya itu dihadiri Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI Justan Riduan Siahaan, Wakil Walikota Palangka Raya Hj. Umi Mastikah beserta sejumlah pimpinan OPD terkait tingkat provinsi dan Kota Palangka Raya serta Kepala Balai Penelitian Tanaman Pangan (BPTP) Kalteng Dr. Ir. Fery Fahruddin Munir, M.Sc.

Sekda Kalteng Fahrizal Fitri mengatakan lahan bergambut pada musim kemarau baik untuk penanaman padi dan nanti pada musim hujan dilakukan pompanisasi. Diharapkan gerakan ini dapat menjadi contoh dan sekolah lapang bagi masyarakat. “Kita harapkan ini adalah sebagai percontohan bagaimana mengelola lahan pertanian dengan baik sehingga kita berharap dengan program Gerakan Percepatan Tanam Padi di Lahan Gambut Kota Palangka Raya ini, potensi kejadian kebakaran semakin kecil. Mungkin selama ini ada asumsi kalau musim kemarau membuka lahan itu dengan cara dibakar, tapi dengan pola seperti ini maka tanam padi bisa 3 kali.

Saya yakin gambut menjadi berkah bagi masyarakat Kalteng”, pungkas Fahrizal Fitri.

Sementara Kepala Dinas TPHP Prov. Kalteng Ir. Sunarti, MM menyebutkan optimasi lahan gambut yang telah dibuka untuk pertanian di Kelurahan Tanjung Pinang seluas 161,5 Ha termasuk 50 Ha tanaman padi, selebihnya untuk berbagai komoditas hortikultura. Disebutkan, tingkat keasaman gambut di Kelurahan Tanjung Pinang mencapai 5,5 dalam artian mendekati normal. Penanaman padi perdana di Kota Palangka Raya tersebut memecahkan pandangan selama ini bahwa di Kota Palangka Raya tidak bisa ditanami padi. “Hari ini telah dibuktikan bahwa tanaman padi dapat ditanam dan tumbuh berkembang di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangka Raya. Demikian juga pengelolaan gambut tidak harus dengan cara dibakar”, tegas Sunarti.

Sunarti juga menyebutkan potensi lahan gambut ke depan untuk pertanian berada di area Bereng Bengkel dengan lahan lebih luas lagi mencapai 400 hektar.

Menurut Sunarti, pengelolaan lahan gambut tidak harus dibakar dan ini jelas dilarang berdasarkan Undang-Undang. Pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian dapat dilakukan melalui kearifan lokal dan kearifan lokal yang ada di Kalimantan Tengah itu berbeda-beda.

Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI Justan Riduan Siahaan yang juga turut menghadiri dan melakukan tanam padi perdana di Kota Palangka Raya itu menyatakan keberadaan lahan gambut merupakan bukti nyata betapa Tuhan berpihak kepada Indonesia. “Lahan ini bisa ditanami saat musim kering atau kemarau. Jadi tidak hanya teori, Indonesia akan menuju Lumbung Pangan Dunia pada tahun 2045, itu yang kita kejar”, ungkapnya.

Kementerian Pertanian sangat mendukung Pemda Kalteng

dalam mengoptimalkan lahan. “Kalau zaman dahulu Alsintan (alat mesin pertanian) hitungannya hanya ribuan, sekarang jumlahnya ratusan ribu, termasuk untuk membentuk tanggul-tanggul. Untuk membuat tanggul-tanggul ini, kami dari Kementerian Pertanian menyiapkan Excavator untuk dipinjamkan kepada kelompok tani. Nanti kalau lahan bisa diolah 2 hingga 3 kali, kami juga menyediakan benih padi maupun hortikultura. Mulai tahun ini hingga 5 tahun ke depan Kementerian Pertanian juga menyiapkan 500 juta benih gratis kepada masyarakat”, ujar Justan.

Ia mengutarakan bahwa petani pertama yang mencoba membangun rawa lembab menjadi sawah adalah petani dari Ogan Ilir, Sumatra Selatan. “Jadi, lahan yang biasanya hanya digunakan 1 kali tanam dan kemungkinan berhasilnya tidak 100 %, sekarang dia bisa membuat 3 kali tanam hanya dengan 3 konsepnya yaitu Tanggulisasi, Kanalisasi, dan Pompanisasi”, ungkap Justan seraya menjelaskan hasil identifikasi lahan gambut di Pulang Pisau juga bisa dikelola dengan konsep yang sama.

Kepala BPTP Kalimantan Tengah Dr. Ir. Fery Fahruddin Munir, M.Sc. mengungkapkan, sejak tahun 2016 – 2017 pemerintah sudah menggerakkan program penanaman lahan gambut, hanya saja luasan area kecil yakni sekitar 0,25 - 1 hektar dengan melakukan uji coba komoditas unggul. “Karena uji coba tersebut sukses dan ada peluang, kami optimis untuk melanjutkan program tersebut, makanya dioptimalkan di Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Bereng Bengkel,” ungkap Fery.

Dijelaskan, sistem penanaman yang akan diterapkan adalah Jajar Legowo, yaitu salah satu sistem penanaman padi di Indonesia dengan cara mengatur jarak antar benih pada saat penanaman. Sistem ini telah terbukti dapat meningkatkan hasil padi dibanding dengan penggunaan sistem tradisional.***

Target Rehabilitasi 2019 Di Kawasan BPDASHL Kahayan Hanya 400 Hektar

PALANGKA RAYA – Biro PKP. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Kahayan tahun 2019 menargetkan rehabilitasi 400 hektar hutan dan lahan di kawasan KSA/KPA Kalimantan Tengah, PKHP Kahayan Hilir, KPKHP Kapuas Kahayan dan KHDTK Tumbang Nusa masing-masing seluas 100 hektar.

Target rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah BPDASHL Kahayan tahun 2019 turun menjadi 400 Ha karena BPDASHL Kahayan tidak masuk Program Nasional (Pronas) serta tidak termasuk Bencana Prioritas dan DAS Prioritas, namun tahun 2020 target rehabilitasinya lebih tinggi mencapai 5.000 Ha mengingat lahan kritis dinilai meningkat akibat kebakaran.

Lahan kritis dalam hal ini adalah lahan yang benar-benar sudah kritis yang secara fisik benar-benar tidak ada tanaman inti atau tanaman yang menghasilkan pendapatan tinggi. Rehabilitasi Hutan dan Lahan seluas 400 hektar dilaksanakan pihak ketiga melalui swakelola secara kontrak umum dan lelang umum yang sudah ada pemenangnya, sedangkan pelaksanaannya pada musim penghujan mendatang.

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) tersebut, BPDASHL Kahayan menggelar Bimbingan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2019

Wilayah Kerja BPDASHL Kahayan di Palangka Raya, Rabu (11/9/2019).

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Ir. Sri Suwanto, M.S ketika membuka Bimtek itu mengatakan rehabilitasi hutan dan lahan menjadi salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan lahan kritis dan degradasi lingkungan.

Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat, pembiayaan yang memadai, koordinasi, kerjasama dan strategi yang tepat untuk mencapai hasil yang optimal. “Kelembagaan yang kuat menjadi prasyarat utama dalam menentukan keberhasilan kegiatan RHL ini. Kita menindaklanjuti program nasional ini di daerah melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kahayan.

Kita sudah membentuk Tim Pembina yang diketuai Gubernur. Kemudian ada Tim Pendamping dan Tim Penyuluhan serta Penyuluhan-Penyuluhan di daerah. Semuanya kita libatkan agar prosesnya sampai penanaman RHL bisa berjalan dengan baik”, jelas Sri Suwanto.

Mengacu dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan RHL telah dibentuk Tim Pembina, Tim

Pengendali dan Tim Pendamping RHL tingkat provinsi Kalteng. “Tim ini berperan penting dalam memberikan arahan, supervisi, bimbingan teknis dan pendampingan menyeluruh terhadap keberhasilan pelaksanaan RHL Tahun 2019 di wilayah kerja BPDASHL Kahayan”, terang Sri Suwanto.

Bimtek ini diikuti Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangka Raya, Kepala UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala KPHL dan KPHP di Provinsi Kalimantan Tengah, Koordinator dan Anggota Tim Pembina Rehabilitasi Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah, Koordinator dan Anggota Tim Pengendali Rehabilitasi Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah, Tim Pendamping RHL P0, Petugas Lapangan RHL P1 dan P2 serta Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2019 dengan nara sumber Kepala BPDASHL Kahayan Ir. Supriyanto Sukmo Sejati, M.Si.

Dalam Bimtek tersebut juga diserahkan SK Gubernur Kalteng tentang Tim Pembina Rehabilitasi Hutan dan Lahan Provinsi Kalteng, SK Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Kahayan tentang Pembentukan Tim Pengendali Rehabilitasi Hutan dan Lahan Provinsi Kalteng 2019 serta SK Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Kahayan selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Petugas Pendamping Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berjalan 2019.***

Gubernur Kukuhkan Pengurus Komunitas Tionghoa Kalteng Periode 2019-2023

PALANGKA RAYA – Biro PKP. Pengurus Paguyuban Sosial Marga Thionghoa Indonesia (PSMTI) Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2019-2023 dilantik oleh Ketua Umum PSMTI Pusat David Hermanjaya dan dikukuhkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran di Hotel Bahalap Palangka Raya, Kamis (19/09/2019).

Gubernur Sugianto Sabran mengharapkan Jajaran Pengurus PSMTI Provinsi Kalimantan Tengah masa bhakti 2019-2023 dapat memberikan ide dan masukan yang bersifat konstruktif untuk pembangunan di Bumi Tambun Bungai sehingga Kalimantan Tengah dan masyarakatnya lebih maju lagi dan kesejahteraannya meningkat. "Dapat mewujudkan cita-cita kita bersama yaitu menuju Kalteng BERKAH serta mampu membawa kemajuan dan kesejukan di tengah masyarakat kita", jelas Gubernur.

Anggota dan Pengurus PSMTI Provinsi Kalteng juga diharapkan dapat mendukung proses pembangunan dengan menjaga keutuhan bangsa dan negara, memelihara suasana kondusif, merawat dan memelihara kebersamaan serta menjunjung tinggi nilai luhur Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. "Huma Betang dan Belom Bahadat harus menjadi pedoman, terutama dalam hal kita hidup bersama, bermasyarakat dan bernegara dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia



agar senantiasa utuh dan tetap bersatu," tegas Sugianto Sabran.

Pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Provinsi Kalteng Periode 2019-2023 itu Diketuai Frans Martinus dan Agustin Teras Narang sebagai Anggota Dewan Pembina dan Ketua Dewan Pakar dalam Kepengurusan PSMTI Provinsi Kalteng tersebut.

Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Paguyuban Sosial

Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Provinsi Kalteng Periode 2019-2023 itu juga dihadiri Sekda

Kalteng Fahrizal Fitri, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Yuel Tanggara, Kepala Inspektorat Kalteng Sapto Nugroho, Kepala Dinas Kehutanan Sri Siswanto, Kepala Dinas Sosial Kalteng Suhaemi, Kepala Satpol PP Kalteng Baru I Sangkai dan

Walikota Palangka Raya Farid Naparin.***

Perkawinan Usia Anak Di Kalteng Masih Tinggi.

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Prevalensi perkawinan anak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih tinggi dan tidak mengalami penurunan yang signifikan. Kalimantan Tengah berdasarkan data Susenas tahun 2018 berada pada urutan ke - 2 prevalensi perkawinan anak yaitu 19,1 % yang berarti lebih tinggi dari dari prevalensi perkawinan anak secara nasional yaitu 11,2 %.

Tingginya perkawinan usia anak di Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya sama dengan daerah lain yang dipicu oleh kemiskinan, norma sosial, pornografi dan ketidaktahanan terhadap berbagai dampak negatif yang akan dialami oleh anak yang terpaksa harus berkeluarga lebih muda dari usia normal.

Gubernur Kalimantan Tengah mengungkapkan hal itu dalam sambutan tertulis dibacakan Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri pada Rapat Koordinasi Pencegahan Perkawinan Anak di Kalimantan Tengah yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI bersama Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Rabu (25/09/2019).

Tingginya prevalensi perkawinan usia anak di Kalimantan Tengah tersebut ternyata berpengaruh langsung kepada indikator pembangunan seperti tingginya angka stunting dan masih adanya anak yang mengalami gizi buruk. Karena itu Gubernur Kalimantan Tengah telah menginstruksikan kepada semua jajaran terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan instansi vertikal termasuk Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah agar membuat langkah-langkah strategis menghapus perkawinan usia anak. "Saya mengapresiasi langkah-langkah positif yang telah dilakukan dalam bidang perlindungan perempuan dan anak di level provinsi, kabupaten dan kota sehingga tahun 2019 untuk pertama kalinya ada kabupaten di Kalimantan Tengah yang berhasil meraih predikat KABUPATEN LAYAK ANAK. Untuk itu Saya ucapan selamat

kepada Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Katingan atas kerja keras dan perhatiannya dalam mengedepankan pembangunan yang berbasis kepada masa depan anak-anak di Kalimantan Tengah", ujar Sugianto Sabran.

Gubernur mengharapkan semua kabupaten dan kota lainnya agar mengikuti jejak 2 kabupaten tersebut sehingga tahun-tahun mendatang bisa meraih predikat yang sama dan satu saat kelak akan terwujud PROVILA atau Provinsi Layak Anak di Bumi Tambun Bungai Provinsi Kalimantan Tengah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor : 20 Tahun 2019 tentang UPT PPA atau Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang bernaung di bawah Dinas P3APPKB.

Keberadaan UPT ini lebih mempertegas kehadiran pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya-upaya perlindungan terhadap kekerasan pada anak perempuan, perdagangan manusia dan penghapusan perkawinan usia anak. "Keberadaan UPT ini harus mengutamakan berbagai upaya pencegahan dengan tidak mengesampingkan upaya-upaya penanganan kasus-kasus pada perempuan dan anak yang sebelumnya kurang dilakukan secara maksimal. Keberadaan UPT ini niscaya akan signifikan menurunkan bahkan menghapus perkawinan usia anak di Kalimantan Tengah", tegas Gubernur

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara administratif juga telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Nomor : 236/069/DP3APPKB-V/2018 tentang Pencegahan / Penghapusan Perkawinan Usia Anak Di Kalteng. "Untuk itu diharapkan Kabupaten / Kota dan semua OPD terkait di Provinsi Kalimantan Tengah agar berpedoman pada Surat Edaran tersebut dalam upaya kita bersama mencegah bahkan menghapus perkawinan usia anak di Kalimantan Tengah", imbuh Sugianto.

Sugianto Sabran mengapresiasi kepercayaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Republik Indonesia yang telah memilih 2 Desa di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Desa Percontohan Bebas dari Pornografi Anak yaitu Desa Pasir Panjang dan Deda Pangkalan Satu Kabupaten Kotawaringin Barat. Di seluruh Indonesia hanya 8 Desa yang dijadikan model percontohan oleh pemerintah pusat untuk nantinya ditiru oleh semua Desa dan Kelurahan se-Indonesia.

Diharapkan seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah agar mengambil manfaat positif keberadaan Desa Model Percontohan yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Keberadaan desa model atau percontohan nasional di provinsi Kalteng ini seharusnya memicu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah untuk membuat Desa Model Percontohan Tingkat Kabupaten yang nantinya akan mempercepat tercapainya Desa Bebas Pornografi di seluruh Kalimantan Tengah."Semakin banyak Desa dan Kelurahan di Kalimantan Tengah yang terbebas dari pornografi maka akan mengurangi dampak buruk pornografi terhadap pertumbuhan jiwa dan raga anak. Bila kita secara bersama-sama mulai dari keluarga, kelompok masyarakat sampai pemerintah mempersiapkan dengan baik perkembangan jiwa raga generasi penerus bangsa, maka dipastikan akan berpengaruh pada percepatan terhapusnya Perkawinan Usia Anak di Kalimantan Tengah", terang Gubernur.

Sementara itu, Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Marwan Syaukani menyampaikan penghargaan atas terbitnya Surat Edaran Gubernur untuk mencegah/menghapus perkawinan usia anak di Kalimantan Tengah. Menurut Marwan, prevalensi perkawinan usia anak di Kalimantan Tengah ternyata tidak saja karena kemiskinan namun juga budaya. "Menjadi tantangan pemerintah daerah dalam menurunkan prevalensi perkawinan usia anak melalui pendekatan/elaborasi budaya dan pembangunan SDM sehingga SDM Kalimantan Tengah nantinya mampu bersaing dengan daerah lainnya", tegas Marwan.***

GERAKAN *Kerukunan*
NASIONAL *Mental*

BEDAH PEMERINTAHAN
PENGETAHUAN MANGSA DAN KEBUTUHAN
SIDOARJO INDONESIA



Rapat Koordinasi

Pencegahan Perkawinan Anak

